

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Singaparna sebagai ibukota Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan. Berdasarkan data dari website resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna memiliki luas wilayah 24,82 km². Data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya 4 mei 2017 jumlah penduduk Singaparna mencapai angka 67,952 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 2337 per km². Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka terjadi peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana yang lebih baik. Salah satu prasarana yang perlu di tingkatkan adalah jalan raya. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan sebagai prasarana perangkutan diharapkan dapat menampung semua jenis kendaraan dan memberikan pelayanan yang nyaman dan baik bagi semua kendaraan yang melintas diatasnya. Seiring dengan bertambah banyaknya kendaraan di Kabupaten Tasikmalaya, timbul kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan terutama di Singaparna.

Di kawasan Jalan Raya Timur Singaparna, Jalan Raya Cikeleng dan Jalan Raya Barat Singaparna merupakan daerah pemukiman, perkantoran dan perdagangan-jasa. Di kawasan tersebut kebutuhan transportasi adalah sebuah konsekuensi atau hal yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan lalu lintas di kawasan tersebut yang berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan-permasalahan lalu lintas seperti perparkiran, kemacetan lalu lintas, kelambatan, kecelakaan dan gangguan lalu lintas lainnya yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian waktu dan biaya. Untuk mengurangi masalah tersebut, peningkatan kinerja ruas jalan dan penataan lalu lintas merupakan salah satu

alternatif dari sekian banyak alternatif yang dapat dilakukan. Sehingga diharapkan kawasan Singaparna, Jalan Raya Timur Singaparna, Jalan Raya Cikeleng dan Jalan Raya Barat Singaparna mampu memberikan pelayanan lalu lintas sesuai fungsi wilayah dan perkembangan yang ada. Pada hari biasa saja, jalan di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sudah tidak dapat menampung volume kendaraannya yang sangat tinggi. Disamping terjadi kemacetan lalu lintas, juga timbul masalah dalam penyediaan lahan parkir. Padahal peraturan tentang parkir telah ditetapkan didalam pengurangan fasilitas parkir di pinggir jalan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam pasal 43 ayat (3) yang berbunyi fasilitas parkir didalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan kota pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan, atau lebih ekstrem menghilangkan fasilitas parkir dipinggir jalan.

Fakta dilapangan menunjukan bahwa kesemrawutan parkir masih banyak terjadi di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, terutama di parkir tepi jalan umum, bahu jalan dan trotoar. Lahan parkir di Kabupaten Tasikmalaya terbilang sangat mudah didapatkan, bahkan ruang kosong di tepi jalan pun bisa menjadi lahan liar, asal ada setoran ke oknum yang menguasai ruang tepi-tepi jalan. Banyak pihak yang terlibat dibelakang perparkiran di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya memang sangat kompleks. Selain menimbulkan ketidaknyamanan untuk pejalan kaki karena jalan sebagian dipergunakan untuk tempat parkir, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat kurang jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang semakin bertambah. Dengan kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah, maka masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk tempat parkir.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh parkir sangatlah kompleks, mulai dari mengganggu kelancaran lalu lintas, parkir juga membuat kesemrawutan kota dan kurang tertatanya suatu wilayah dengan baik. Parkir yang ada ditepi jalan merupakan salah satu bentuk konsep ruang dan waktu dalam aktifitas sehari-hari. Di dalam ruang dan waktu semua manusia beraktifitas atau melakukan praktik itu selalu terikat oleh friksi jarak, dimana friksi jarak itu tersembunyi di dalam ruang

yang terdapat pada kelompok tertentu atas ruang dan waktu yang didominasinya. Ruang dan waktu bagi juru parkir terkait dengan jarak, seperti yang diketahui bahwa di dalam dunia perparkiran setiap juru parkir menguasai daerah atau ruang tertentu yang jarak antara juru parkir satu dengan juru parkir lainnya sama bahkan tidak sama. Parkir di tepi jalan itu biasanya tanpa adanya pembatas antara parkir satu dengan parkir yang lainnya. Batasan-batasan yang digunakan dalam menyekat ruang disini bersifat abstrak, tidak bisa diketahui banyak orang. Batasannya disini berupa simbol-simbol yang telah ada dan disepakati bersama itu untuk menentukan pembagian jarak di dalam ruang parkir.

Di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya sedikitnya terdapat 35 lokasi titik parkir yang tersebar di setiap wilayah dan dikelola oleh 47 juru parkir resmi. Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan tidak jarang tempat parkir merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan. Secara umum, masyarakat yang beraktifitas kurang memahami tempat-tempat yang merupakan daerah larangan parkir. Sehingga mereka memarkirkan kendaraannya sesuka hati.

Tabel 1.1
Lokasi Parkir dan Petugas Parkir di Kabupaten Tasikmalaya

No	WILAYAH	JUMLAH LOKASI	JUMLAH PETUGAS
1	Singaparna	35	47
2	Mangunreja	4	5
3	Salawu	2	6
4	Puspahiang	1	2
5	Taraju	1 (kawasan)	7
6	Bojonggambir	1 (kawasan)	2
7	Sukaratu	2 (kawasan)	10
8	Cisayong	3	3
9	Rajapolah	15	15
10	Ciawi	26	26
11	Pagerageung	1	2
12	Manonjaya	19	19
13	Cineam	4	4
14	Salopa	1	1
15	Cikatomas	1 (kawasan)	3
16	Cikalong	13	13
17	Cipatujah	2	3

No	WILAYAH	JUMLAH LOKASI	JUMLAH PETUGAS
18	Bantarkalong	10	10
19	Karangnunggal	8	12
20	Sukaraja	2	2
		151	183

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dinas Perhubungan Tahun 2020

Secara ekonomi sebenarnya perparkiran berpotensi luar biasa namun terpuruk sebagai akibat dari salah urus. Tidak semua tempat parkir dikendalikan secara resmi sehingga sering muncul juru parkir tidak resmi yang mengumpulkan seluruh pendapatannya ke dalam kantong sendiri, walaupun tidak jarang ditemui juga ada juru parkir resmi yang melakukan hal yang sama. Tidak jarang terjadi perselisihan antar juru parkir memperebutkan kawasan atau daerah yang dikuasai. Pengawasan merupakan hal yang penting dalam pengumpulan pendapatan dari juru parkir resmi, untuk mendapatkan kisaran target yang hendak dicapai perlu dihitung dari data perputaran parkir dalam satu hari, sehingga perkiraan pendapatan dalam satu hari adalah jumlah ruang parkir dikali perputaran parkir dikali tarif parkir.

Juru parkir dapat diidentifikasi memakai pakaian rompi berwarna orange bertuliskan “juru parkir” dibelakangnya, membawa pluit dan karcis. Profesi juru parkir sebenarnya membantu pengendara dalam memarkirkan kendaraannya. Namun profesi ini seringkali mengundang ejekan dan dipandang rendah tapi tetap saja profesi ini tetap menjadi lahan rebutan sehingga terjadi pembagian lahan kekuasaan dikalangan juru parkir sendiri. Akibat kondisi kehidupan yang sangat keras, kurangnya lapangan pekerjaan dan didukung dengan kondisi pendidikan masyarakat yang tergolong rendah, maka tak sedikit orang yang memilih berprofesi sebagai juru parkir. Banyak juru parkir yang berfikir bagaimana bertahan guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Tekad untuk dapat bertahan hidup mengharuskan mereka terjun menjadi juru parkir. Dapat dilihat bahwa pekerjaan sebagai juru parkir tidaklah mudah, banyak keluh kesah yang dialami. Diantara pemilik kendaraan ada yang peduli dengan nasib juru parkir dan ada pula yang tidak peduli sama sekali dengan tidak membayar parkir. Tetapi pada kenyataannya juga banyak juru parkir yang melakukan penipuan. Jika ada kendaraan yang parkir, para

juru parkir yang nakal tidak memberikan karcis tetapi tetap meminta uang biaya parkir untuk dimasukkan ke kantongnya sendiri.

Berkaitan dengan pelayanan jasa parkir di Kabupaten Tasikmalaya, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Perilaku Juru Parkir, Kurangnya Lahan Parkir dan Jaminan Keamanan Terhadap Parkir Liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.**” Diharapkan setelah mengetahui Perilaku Juru Parkir, Kurangnya Lahan Parkir dan Jaminan Keamanan, dapat mengoptimalkan lahan parkir dan meminimalisir parkir liar di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah telah disebutkan bahwa keterlibatan parkir liar, pengaruh perilaku manusia, kurangnya lahan parkir dan jaminan keamanan parkir merupakan hal-hal yang penting dalam menganalisis pengaruh parkir liar di ruas jalan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi peneliti menganalisis parkir liar di ruas jalan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah variabel perilaku juru parkir berpengaruh terhadap parkir liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Apakah variabel kurangnya lahan parkir berpengaruh terhadap parkir liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?
- c. Apakah variabel jaminan keamanan berpengaruh terhadap parkir liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh perilaku juru parkir terhadap parkir liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kurangnya lahan parkir terhadap parkir liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

- c. Untuk menganalisis pengaruh jaminan keamanan terhadap parkir liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh perilaku juru parkir, kurangnya lahan parkir dan jaminan keamanan terhadap parkir liar di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai cara untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dan mengaplikasikan dengan kenyataan yang ada, serta menambah pengalaman dan pengetahuan penulis akan masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan transportasi khususnya transportasi darat.
- b. Memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Transportasi di Universitas Maritim AMNI (UNIMAR AMNI) Semarang.

2. Bagi Universitas Maritim AMNI Semarang

Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya bagi mahasiswa/i Universitas Maritim AMNI Semarang.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat penggunaan jasa parkir di ruas jalan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

4. Bagi Pembaca

Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi taruna dan mahasiswa Universitas Maritim AMNI (UNIMAR AMNI) Semarang khususnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang penelitian yang dilakukan, dibuat suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal skripsi yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bagian kedua dari skripsi yang menguraikan landasan teori dan tinjauan pustaka yang mendasari penelitian, kerangka pikir penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bagian ketiga dari skripsi berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Di dalam hasil dan pembahasan ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data, pembahasan, dan implikasi manajerial.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis data.

Daftar Pustaka

Lampiran

